

## Siaran Pers

### **PEMBANGUNAN INDONESIA YANG BERKELANJUTAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON**

Jakarta (25/10) – Tantangan pelaksanaan pembangunan saat ini adalah bagaimana menginternalisasikan keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup ke dalam kebijakan target pembangunan ekonomi dan target pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi selama ini cenderung disertai dengan penurunan kualitas lingkungan. Korelasi negatif inilah yang menjadi tantangan bersama untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan. Penerapan pembangunan rendah karbon menjadi penting untuk mengubah pola pembangunan yang tidak berkelanjutan tersebut menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan tersebut dapat terlihat dari peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, perlu adanya perspektif pembangunan rendah karbon yang mendorong perencanaan pembangunan yang lebih baik. Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran strategis untuk memastikan keseimbangan pencapaian pembangunan rendah karbon, baik dalam pembangunan jangka menengah, maupun pendetailannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah tiap tahunnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Pembukaan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) di Gedung Widjojo Nitisastro, Kementerian PPN/Bappenas, Rabu pagi, untuk membangun persepsi dan pemahaman yang sama mengenai perencanaan pembangunan rendah karbon, dan menyampaikan hasil pencapaian RAN/RAD-GRK yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak sesuai mandat Perpres No. 61 Tahun 2011.

“Integrasi perencanaan pembangunan ekonomi, sektoral, dan penurunan emisi GRK melalui perencanaan pembangunan rendah karbon memerlukan basis hukum yang kuat,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) akan diperkuat melalui sebuah Perpres baru tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Rancangan Perpres PPRK berorientasi kepada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan stabilitas sosial serta upaya penurunan emisi GRK, mengingat penanganan perubahan iklim tidak dapat hanya semata fokus pada penurunan emisi GRK saja. Saat ini, rancangan Perpres PPRK tersebut sedang dalam tahap pembahasan antar Kementerian/Lembaga.

Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat RAN-GRK telah mengupayakan keterlibatan aktif K/L, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk mengoordinasikan pelaksanaan dan melaporkan upaya penurunan emisi GRK sejak tahun 2010. Data yang terkumpul menunjukkan potensi pencapaian penurunan emisi GRK telah mencapai 10,6% (non-kehutanan) dan diperkirakan meningkat 13,47% (termasuk sektor kehutanan) di tahun 2016. Selain itu, Indonesia telah berhasil menurunkan intensitas emisi nasional (emisi GRK per satuan *output* ekonomi) dari 681,16 ton CO<sub>2</sub>e/miliar rupiah di tahun 2010 menjadi 512,08 ton CO<sub>2</sub>e/miliar rupiah di tahun 2016.

Selanjutnya, untuk mengoordinasikan pelaksanaan serta mempermudah proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian perencanaan pembangunan rendah karbon, Sekretariat RAN-GRK Kementerian PPN/Bappenas telah menyiapkan sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Online sejak Februari 2016. Tujuan dibuatnya sistem PEP *online* ini untuk memperkuat kapasitas pihak-pihak terkait dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia melalui penyediaan data, informasi, dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang akurat, serta memudahkan semua pihak untuk melaporkan pencapaian penurunan emisi GRK dari semua bidang beserta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. “Penyempurnaan kebijakan dan implementasi upaya penanganan perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon tentunya tidak hanya tugas dari satu Kementerian/Lembaga saja, melainkan diperlukan upaya koordinasi yang baik dan pelibatan seluruh elemen pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan didukung oleh seluruh pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat,” tegas Menteri Bambang.



Jakarta, 25 Oktober 2017

Thohir Afandi  
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan  
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310  
Telepon: (021) 31936207, 3905650  
Faksimile: (021) 31901154  
Email: [humas@bappenas.go.id](mailto:humas@bappenas.go.id)